

ABSTRAK

Tanggung jawab notaris atas kesalahan administratif dalam penentuan dan pengajuan izin usaha melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS). Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan mengajukan pengesahan badan hukum melalui sistem AHU, notaris memegang peran penting dalam memastikan kesesuaian data antara akta pendirian dan sistem perizinan elektronik.

Dengan menggunakan pendekatan non-doktrinal melalui wawancara terhadap notaris, DPMPTSP Jawa Tengah, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, penelitian menemukan bahwa akar permasalahan meliputi perbedaan interpretasi KBLI, ketidaktepatan penginputan data, keterbatasan pemahaman pelaku usaha, serta hambatan teknis sinkronisasi sistem. Dalam konteks tanggung jawab hukum, notaris bertanggung jawab secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tanggung jawab jabatan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta tanggung jawab etik berdasarkan Kode Etik Notaris.

Penelitian ini memberikan saran bahwa perlunya standarisasi KBLI, peningkatan kapasitas notaris dan petugas DPMPTSP, penguatan koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi integrasi sistem OSS–AHU demi tercapainya kepastian hukum dan peningkatan kualitas layanan perizinan berusaha.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Penentuan Pengajuan Izin Usaha, Sistem *Online Single Submission*

ABSTRACT

The notary's responsibility for administrative errors in determining and submitting business permits through the Online Single Submission (OSS) system. As a public official authorised to draw up authentic deeds and submit legal entity approvals through the AHU system, notaries play an important role in ensuring data consistency between deeds of establishment and the electronic licensing system.

Using a non-doctrinal approach through interviews with notaries, the Central Java DPMPTSP, and the Central Java Regional Office of the Ministry of Law, the study found that the root causes of the problem included differences in the interpretation of the KBLI, careless data entry, limited understanding among business actors, and technical obstacles to system synchronisation. In the context of legal responsibility, notaries are liable under civil law based on Article 1365 of the Civil Code, professional responsibility in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Profession, and ethical responsibility based on the Notary Code of Ethics.

This study recommends the need for KBLI standardisation, capacity building for notaries and DPMPTSP officers, strengthening inter-agency coordination, and optimising the integration of the OSS-AHU system in order to achieve legal certainty and improve the quality of business licensing services.

Keywords: *Notary Responsibilities, Determination of Business Licence Applications, Online Single Submission System*